

FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KECAMATAN SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI

Rio Baviga

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci

Email : riobaviga@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the factors: (1) Competence of village financial management apparatus, (2) community participation, (3) village government organizational commitment (4) compliance with financial reports. This research is classified as an ex post facto, causal associative, and quantitative approach. The population in this study were all villages in the Siulakmukai sub-district, Kerinci district which consisted of 14 villages. The sampling technique used purposive sampling. The number of respondents was 42 people who had met the criteria and the data analysis tool used multiple linear regression. The results of this study indicate that the competence of village financial management officers (X1) partially has a negative effect on village financial management, as evidenced by $t_{count} > t_{table}$ ($-0.192 > -2.02619$) and with a significance value = $0.849 > 0.05$. Meanwhile, community participation (X2) has a positive effect on village financial management as evidenced by $t_{count} > t_{table}$ ($27.329 > 0.02619$) and with a significance value = $0.000 < 0.05$. Meanwhile, village government organizational commitment (X3) has a negative effect on financial management, this is evidenced by $t_{count} > t_{table}$ ($-0.655 > -2.02618$) and with a significance value = $0.516 > 0.05$. Meanwhile, obedience to financial statements (X4) has a significant positive effect on village financial management, as evidenced by $t_{count} < t_{table}$ ($0.591 > 2.02619$) and the significance value = $0.558 > 0.05$. Competence of village financial management apparatus (X1), Community participation (X2), Meanwhile, village government organizational commitment (X3), Compliance with financial reports (X4) simultaneously have a significant positive effect on village financial management, this is evidenced by $F_{count} > F_{table}$ ($196,236 > 2, 62$) and with a significant value = $0.000 < 0.05$.

Keywords: *Competence of village financial Management apparatus, Community participation, Commitment of village government organizations, Obedience to financial reports.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan Bahwa “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Sebagaimana fungsinya desa merupakan tolok ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara, Seringkali desa terabaikan oleh negara dan penyelenggaraan desa hanya terbatas pada perintah pemerintah pusat ataupun daerah. Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa.

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan Asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam pelaksanaan keuangan desa, maka diperlukan adanya kapasitas perangkat desa yang memadai. Wasistiono dan Tahir (2006) mengemukakan bahwa umumnya pemerintah desa memiliki kelemahan-kelemahan dalam hal berikut; (1) kualitas sumber daya manusia yang menjadi aparat desa masih rendah; (2) kebijakan atau peraturan-peraturan terkait pemerintahan desa masih belum sempurna; (3) kemampuan dalam hal perencanaan pembangunan di tingkat desa masih rendah; (4) terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang operasional administrasi desa. Kelemahan ini merupakan suatu keterbatasan yang dapat mengganggu efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, dapat pula menurunkan motivasi aparat desa sehingga

pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan pemerintah desa. Landasan mengenai pemerintahan desa merupakan keanekaragaman, partisipasi demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya berupa hal tersebut saja dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa maka setiap aparat pemerintah desa harus memahami hak dan kewajiban masyarakat, harus memahami terlebih dahulu bagaimana hak desa dalam pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer pemerintah (pusat). Pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APDes yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. ini artinya, pemerintah desa tidak lagi tidak beraturan dalam mengelola keuangan desa (Baviga, 2022). Pengelolaan keuangan pemerintahan desa harus mengedepankan Efektivitas. Menurut Sedarmayanti (2009) “efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang di capai”.Efektivitas di sini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi di kaitkan dengan efektivitas maka terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat. Dari efektivitas harus menjadikan suatu gambaran suatu desa yang hendak ditarget dalam pengelolaan keuangan. Efektivitas dalam memajukan pemerintahan desa, dapat dilihat pada berbagai kegiatan pelatihan ketatausahaan pada lembaga pemerintah desa tersebut agar pelayanan terhadap masyarakat lancar, profesional, cepat dan tepat diperlukan kinerja yang efektif

Pengertian keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

- (1) Perencanaan Adalah Suatu proses. Proses perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana.
- (2) Penganggaran adalah Perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya Supriyono (2002).
- (3) Pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- (4) Penata usahaan adalah Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik Negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelaporan adalah salah satu unsur dalam LPJ realisasi APBSes yang harus dilaporkan oleh kepala desa yang menyajikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, catatan atas laporan keuangan beserta rincian aset tetap yang dimiliki desa.

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 dan 2 menetapkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintahan. Berdasarkan perannya tersebut, maka terbitlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan normal. Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa adalah kompetensi aparatur desa. Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti

capak, mampu, atau terampil Dalam ketentuan umum No 113 Tahun 2014 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Stewardship theory merupakan salah satu cabang psikologi dan sosiologi dan didesain untuk peneliti menguji kondisi dimana eksekutif sebagai pengelola yang termotivasi untuk melakukan yang terbaik terhadap kepentingan utama organisasi. Dalam *stewardship theory* dijelaskan bahwa eksekutif sebagai pengelola memiliki peran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Eksekutif sebagai pengelola dapat dijabarkan kedalam lingkup pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sebagai eksekutif/ pelaksana/pengelola/penanggungjawab. Teori akuntabilitas menurut Frink dan Klimoski (2004:3) yang menyatakan bahwa akuntabilitas cenderung berputar pada dua tema tertentu. Tema pertama, menyangkut konteks, yaitu siapa dan apa yang terlibat dalam situasi tertentu. Tema kedua melibatkan pengertian tentang kegiatan evaluasi dan umpan balik dalam beberapa bentuk.

Menurut Agrawal dan Ribot (1999:477) yang mengatakan bahwa semua model akuntabilitas adalah bersifat hubungan. Pada dasarnya terdapat aktor (pemerintah) dan konstituen (masyarakat). Agar pemerintah tidak semena-mena menggunakan kekuasaannya, maka masyarakat seharusnya datang meminta pertanggungjawaban pemerintah. Sehingga pelaksanaan desentralisasi akan lebih akuntabel. Crook dan Sverrisson dalam Devas dan Grant (2003) Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan lebih berpihak pada orang miskin. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan (Ebrahim, 2003). Seperti di *Los Angeles*, partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak warga yang menyalahkan pejabat dalam pengambilan keputusan.

Hasil pengujian ini selaras dengan konsep akuntabilitas yang dikembangkan oleh Cavoukian *et al.* Cavoukian *et al* (2010) mengemukakan terdapat lima elemen penting dari akuntabilitas adalah: (1). Komitmen organisasi terhadap akuntabilitas dan penerapan kebijakan internal yang konsisten dengan kriteria eksternal, (2). Mekanisme untuk menerapkan kebijakan privasi, termasuk alat, pelatihan, dan pendidikan, (3). Sistem untuk pemeriksaan pengawasan dan penjaminan internal dan eksternal, (4). Transparansi dan mekanisme untuk partisipasi individu, dan (5). Sarana untuk remediasi dan penegakan eksternal. Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi, komitmen orang-orang dalam organisasi menjadi penting. *Goal theory* (teori penetapan tujuan) menyatakan bahwa perilaku seseorang individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu. Jika seorang individu komit dengan sasaran tertentu, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya (Suartana, 2010). Karyawan yang memiliki komitmen organisasi ditandai dengan adanya keyakinan kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi, bersedia meningkatkan upaya untuk kepentingan organisasi dan memiliki keinginan yang kuat untuk tetap berada dalam organisasi (Salleh, *et al*, 2013).

Ketaatan yang mendasari (Mudhafir, 1996) adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/ perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar. Berdasarkan permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang dapat dipertanggung jawabkan melalui bupati atau wali kota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan adanya tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desayang harus dipertanggung jawabkan secara akuntabilitas. jadi semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa yang dapat dipertanggung jawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup

kemungkinan adanya tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Jadi semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut. mencerminkan tingkatan keadaan di mana individu mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan terikat pada tujuannya. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2 menjelaskan bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa yang dialokasikan pemerintahan pusat berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja- perubahan (APBNP) tahun 2020 untuk 14 desa yang ada dikecamatan siulak mukai sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Anggaran Kecamatan Siulak Mukai Tahun 2020

No	Desa	Anggaran	Realisasi
1	Mukai mudik	Rp.980.500.000	Rp.720.000.000
2	Mukai pintu	Rp.820.450.000	Rp.700.000.000
3	Mukai tinggi	Rp.1.080.687.100	Rp.812.000.000
4	Mukai tengah	Rp.956.779.000	Rp.916.779.000
5	Talang tinggi	Rp.996.836.000	Rp.739.431.000
6	Tebing tinggi	Rp.987.732.000	Rp.860.634.000
7	Senimpik	Rp.847.325.000	Rp.700.300.000
8	Sungai langkap	Rp.935.365.000	Rp.895.365.000
9	Mukai hilir	Rp.872.245.000	Rp.720.325.000
10	Koto lua	Rp.1.170.826.000	Rp.1.120.826.000
11	Mukai seberang	Rp.1.111.494.400	Rp.1.041.494.400
12	Lubuk tabun	Rp.880.526.000	Rp.732.765.000
13	Pasir jaya	Rp.896.760.000	Rp.725.000.000
14	Sungai kuning	Rp.895.650.000	Rp.720.643.00.

Sumber: Dari staf desa Siulak mukai

Menurut permendagri No 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tanggung jawaban keuangan desa. Setelah melakukan observasi awal di Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci, peneliti menemukan beberapa fenomena sebagai berikut : 1). Kurangnya kompetensi staf desa dalam bidang keuangan, hal itu terlihat dari 14 desa yang ada di kecamatan siulak mukai terdapat 6 desa yang realisasi lebih kecil anggaran, hal ini diindikasikan dari staf desanya tidak memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan desa. demikian terjadi karena tingkat pendidikan yang masih rendah Rata-rata pendidikan terakhir tamatan DII dan bukan tamatan akuntansi atau yang mengerti tentang keuangan desa (Sumber:Perangkat desa dikecamatan siulak mukai). 2). Dilihat dari segi partisipasi masyarakat, banyaknya elemen masyarakat yang tidak diikutsertakan berperan dalam memberikan sumbangsih pemikiran/ide-ide dalam pelaksanaan pembangunan didalam desa. Hal ini terlihat dari absensinya ada banyak masyarakat yang tidak hadir dan tidak ikut dalam berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.(Sumber dari staf desa di kecamatan siulak mukai). 3). Adapun komitmen dalam organisasi pemerintahan desa tidak sesuai dg visi dan misi yang telah ditetapkan oleh perangkat desa itu sendiri, komitmen perangkat desa yang masih rendah terlihat dari adanya tanggung jawab terhadap penyelesaian disetiap kewajiban pemerintah desa ditemukan tidak tepat waktu,yang berdampak pendanaan didesa belum dapat dipenuhi oleh pemerintah desa sesuai dengan visi dan misi desa itu sendiri (Sumber

dari staf desa yang ada di kecamatan siulak mukai). 4). Dalam ketaatan laporan keuangan sering terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan hal ini terlihat dari Kurangnya kedisiplinan dalam penyusunan laporan keuangan yang terjadi pada desa itu sendiri, sehingga keterlambatan yang terjadi 2 minggu setelah laporan keuangan dikumpulkan (sumber dari staf desa yang ada dikecamatan siulak mukai).

Indra Bastian (2014) Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi Negara beserta departemen dibawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Akuntansi sektor public menurut Mardiasmo (2015) adalah alat informasi baik dari pemerintahan sebagai manajemen atau alat informasi bagi public. Menurut Halim (2014) akuntansi sektor public merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Berikut inilah karakteristik dari akuntansi sektor public: 1). Relevan. Laporan keuangan pada akuntansi sektor publik harus bersifat relevan, yang dimaksud dengan relevan adalah berisi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta mengevaluasi peristiwa dimasa lalu dan masa yang akan datang. 2). Handal. Laporan keuangan pada akuntansi sektor publik memiliki informasi yang bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan pada akuntansi sektor publik memiliki informasi yang bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan dengan laporan keuangan sebelumnya. 3). Mudah dipahami. Laporan keuangan akuntansi sektor publik memiliki karakteristik informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh semua pihak baik pihak internal maupun eksternal.

Berdasarkan *American Accounting Association*, tujuan utama akuntansi untuk sektor publik adalah untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, laporan ini akan digunakan untuk pengendalian manajemen dan sebagai pertanggungjawaban. Berikut ini ulasan ulasan lengkapnya: 1). *Management control* Tujuan dari akuntansi sektor publik yang pertama adalah *management control*. *management control* adalah memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam pengelolaan yang tepat, efisien dan ekonomis pada operasi dan alokasi sumber daya suatu organisasi atau lembaga. 2). *Accountability* tujuan akuntansi sektor publik selanjutnya adalah *accountability*. *accountability* bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi manajer sektor publik dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban bidang, divisi, atau pun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Selain itu juga bertujuan untuk melaporkan berbagai kegiatan atas operasi pemerintahan dan penggunaan anggaran kepada publik.

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tanggung jawaban keuangan desa.

Asas adalah nilai-nilai yang menjwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu: 1). Transparan. Terbuka-keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya. 2). Akuntabel. Mempunyai pengertian bahwa setiap

tindakan atau kinerja pemerintah/ lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

3). Partisipatif. Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

4). Tertib dan Disiplin Anggaran. Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

1). Alat perencanaan. Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan.

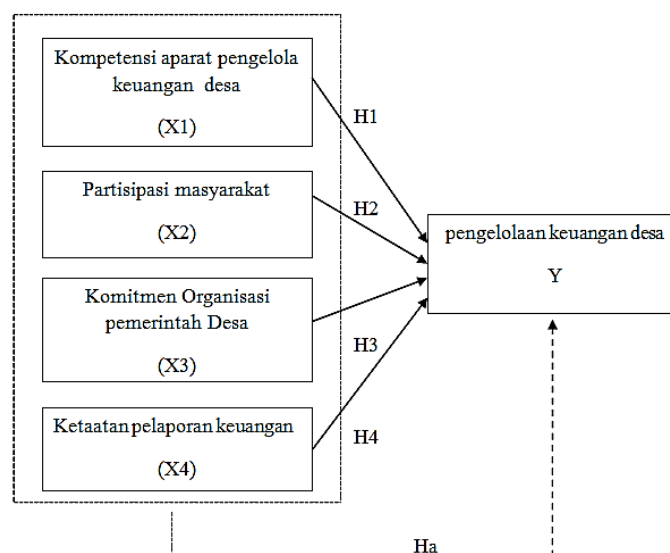
2). Alat pengendalian. Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

3). Alat kebijakan fiskal. Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk diprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.

4). Alat Koordinasi dan komunikasi. Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi.

5). Alat penilaian kinerja. Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa.

6). Alat motivasi. Anggaran dapat digunakan untuk memberikan motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Menurut Djarwanto, (1994) kualitas dan karakteristik tertentu. Menurut Djarwanto, (1994) populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang- orang, institusi-institusi, benda-benda, dsb. Sampel menurut Sugiono (2004) menyatakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria dalam pemilihan sampel penelitiannya adalah kepala desa, bendahara dan sekretaris desa yang masih menjabat sebagai aparatur desa dan memahami tentang pengelolaan keuangan desa. Maka sampel yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari 42 responden dari 14 desa yang ada di kecamatan Siulak Mukai. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: data primer didapatkan dari perangkat desa di kecamatan Siulak Mukai. Data sekunder didapatkan dari jurnal-jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*). Data penelitian ini diolah dengan menggunakan program *statistical package for social science* (SPSS). Analisis regresi linear berganda bermaksud untuk memperkirakan bagaimana keadaan pengelolaan keuangan desa bila dihubungkan dengan dua atau lebih variabel independen yakni Kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa, ketaatan pelaporan keuangan. Menurut Narbuko dan Achmadi (2010) instrumen penelitian adalah alat yang akan digunakan untuk pengumpulan data dan digunakan untuk mengukur ada tidak adanya perbedaan minat konsumen dalam membeli produk. Berbentuk skala likert, untuk melihat seberapa besar skala dengan pengukuran yang akan didapat jawaban tegas yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju, dengan bobot penilaian sebagai berikut.

HASIL DAN DISKUSI

Menurut Sugiyono (2011) bahwa valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukkan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Pelaksanaan perhitungan validitas butir-butir instrument dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Kriteria pengujiannya adalah jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ berarti valid, sebaliknya jika $r\text{-hitung} < r\text{-tabel}$ berarti tidak valid. Untuk uji validitas diujikan kepada 21 staf desa di kecamatan Siulak. Untuk hasil uji validitas variabel pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil uji validitas pertanyaan variabel pengelolaan keuangan desa (Y)

No	Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Ket
1	Y1	0,814	0,432	Valid
2	Y2	0,725	0,432	Valid
3	Y3	0,647	0,432	Valid
4	Y4	0,617	0,432	Valid
5	Y5	0,714	0,432	Valid
6	Y6	0,858	0,432	Valid
7	Y7	0,777	0,432	Valid
8	Y8	0,710	0,432	Valid
9	Y9	0,641	0,432	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan butir-butir kuesioner pada item pertanyaan variabel pengelolaan keuangan desa sebanyak 9 (Sembilan) pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid hal ini dibuktikan dengan nilai $r\text{-hitung}$ pada masing-masing item lebih besar dari $r\text{-tabel}$ (0,432), dan sebanyak 9 butir pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid semuanya hal ini terlihat bahwa $r\text{-hitung}$ lebih besar dari pada $r\text{-tabel}$.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Aparat Pengelolaan Keuangan Desa (X1)

No	Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Ket
1	X1.1	0,811	0,432	Valid
2	X1.2	0,681	0,432	Valid
3	X1.3	0,637	0,432	Valid
4	X1.4	0,570	0,432	Valid
5	X1.5	0,707	0,432	Valid
6	X1.6	0,829	0,432	Valid
7	X1.7	0,757	0,432	Valid
8	X1.8	0,682	0,432	Valid
9	X1.9	0,612	0,432	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan butir-butir kuesioner pada item pertanyaan variabel pengelolaan keuangan desa sebanyak 9 (Sembilan) pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid hal ini dibuktikan dengan nilai *r-hitung* pada masing-masing item lebih besar dari *r-tabel* (0,432), dan sebanyak 9 butir pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid semuanya hal ini terlihat bahwa *r-hitung* lebih besar dari pada *r-tabel*.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat (X2)

No	Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Ket
1	X2.1	0,843	0,432	Valid
2	X2.2	0,680	0,432	Valid
3	X2.3	0,576	0,432	Valid
4	X2.4	0,586	0,432	Valid
5	X2.5	0,662	0,432	Valid
6	X2.6	0,834	0,432	Valid
7	X2.7	0,689	0,432	Valid
8	X2.8	0,715	0,432	Valid
9	X2.9	0,538	0,432	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan butir-butir kuesioner pada item pertanyaan variabel pengelolaan keuangan desa sebanyak 9 (Sembilan) pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid hal ini dibuktikan dengan nilai *r-hitung* pada masing-masing item lebih besar dari *r-tabel* (0,432), dan sebanyak 9 butir pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid semuanya hal ini terlihat bahwa *r-hitung* lebih besar dari pada *r-tabel*.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi Pemerintahan (X3)

No	Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Ket
1	X3.1	0,640	0,432	Valid
2	X3.2	0,508	0,432	Valid
3	X3.3	0,694	0,432	Valid
4	X3.4	0,513	0,432	Valid
5	X3.5	0,457	0,432	Valid
6	X3.6	0,440	0,432	Valid
7	X3.7	0,713	0,432	Valid
8	X3.8	0,463	0,432	Valid
9	X3.9	0,542	0,432	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan butir-butir kuesioner pada item pertanyaan variabel pengelolaan keuangan desa sebanyak 9 (Sembilan) pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid hal ini dibuktikan dengan nilai *r-hitung* pada masing-masing item lebih besar dari *r-tabel* (0,432), dan sebanyak 9 butir pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid semuanya hal ini terlihat bahwa *r-*

hitung lebih besar dari pada *r-tabel*.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Ketaatan Laporan Keuangan (X4)

No	Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Ket
1	X4.1	0,800	0,432	Valid
2	X4.2	0,660	0,432	Valid
3	X4.3	0,589	0,432	Valid
4	X4.4	0,570	0,432	Valid
5	X4.5	0,676	0,432	Valid
6	X4.6	0,818	0,432	Valid
7	X4.7	0,706	0,432	Valid
8	X4.8	0,702	0,432	Valid
9	X4.9	0,556	0,432	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 6 diatas menunjukkan butir-butir kuesioner pada item pertanyaan variabel pengelolaan keuangan desa sebanyak 9 (Sembilan) pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid hal ini dibuktikan dengan nilai *r-hitung* pada masing-masing item lebih besar dari *r-tabel* (0,432), dan sebanyak 9 butir pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid semuanya hal ini terlihat bahwa *r-hitung* lebih besar dari pada *r-tabel*.

Uji reliabilitas yang akan dilakukan untuk pengujian kuisoner adalah dengan menggunakan komputer yaitu dengan aplikasi program SPSS versi 20. Kriteria pengujian uji reabilitas adalah Sugiyono (2011), sebagai berikut : 1). Apabila hasil koefisien Alpha adalah lebih besar dari taraf signifikansi 60% atau 0,6 maka kuesioner tersebut reliable. 2). Apabila hasil koefisien Alpha adalah lebih kecil dari taraf signifikansi 60% atau 0,6 maka kuesioner tersebut tidak reliable.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's alpa	Standar reabilitas	Ket
1	Pengelolaan Keuangan Ddesa	0,884	0,6	Reliabel
2	Kompetensi Aparat Pengelolaan Keuangan Desa	0,867	0,6	Reliabel
3	Partisipasi masyarakat	0,854	0,6	Reliabel
4	Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa	0,707	0,6	Reliabel
5	Ketaatan Laporan Keuangan	0,850	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer diolah 2022

Dari tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa koefisien ke 1,2,3,4 dan 5 instrumen memiliki *cronbach alpha* $\geq 0,6$ sehingga dinyatakan bahwa instrument penelitian ini telah diuji keandalannya (reliabel).

Tabel 8. Deskripsi Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

No	Item	SS	S	Ts	STS	N	Jumlah Skor	Rata-Rata	Tcr %	Kriteria
Indicator Keuangan Desa Digunakan Dalam Bidang Pembangunan Desa										
1	Y1	21	16	5	-	42	142	3.38095	84.52	baik
2	Y2	19	20	3	-	42	142	3.38095	84.52	baik
3	Y3	21	16	5	-	42	142	3.38095	84.52	baik
Rata-Rata									84.52	baik
Indicator bidang pembinaan masyarakat										
4	Y4	14	23	5	-	42	135	3.21429	80.35	Baik
5	Y5	15	16	11	-	42	130	3.09524	77.38	Cukup baik
6	Y6	19	16	11	-	42	146	3.47619	86.90	Baik
Rata-Rata									81.54	Baik

Indicator bidang penyelenggara pemerintahan desa

7	Y7	13	20	9	-	42	130	3.09524	77.381	Cukup baik
8	Y8	23	5	4	-	42	115	2.7381	68.452	Kurang baik
9	Y9	19	19	4	-	42	141	3.35714	83.929	Baik
Rata-Rata									76.58	Cukup Baik

Sumber: data primer diolah,2022

Berdasarkan dari tabel 16 diatas, maka dapat diperoleh gambaran jawaban responden sebagai berikut: Dari 9 item pernyataan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh skor rata-rata tertinggi pada indikator keuangan desa digunakan dalam bidang pembangunan desa dengan TCR 84,52% dalam katogori baik. Sedangkan skor rata-rata terendah berada pada indikator bidang penyelenggaraan pemerintah desa dengan TCR 76,58 % dalam kategori cukup baik.

Tabel 9. Deskripsi Kompetensi Aparat Pengelolaan Keuangan Desa (X1)

No	Item	SS	S	Ts	STS	N	Jumlah Skor	Rata-Rata	Tcr %	Kriteria
Indicator pemahaman tentang akuntansi										
1	X1.1	21	16	5	-	42	169	4.0238095	100.59	Sangat baik
2	X1.2	18	12	3	-	42	135	3.2142857	80.35	Baik
3	X1.3	21	16	5	-	42	169	4.0238095	100.59	Sangatbaik
RATA-RATA									93.84	Sangat baik
Indicator SDM yang berkualitas										
4	X1.4	13	26	3	-	42	139	3.3095238	82.73	Baik
5	X1.5	13	20	9	-	42	139	3.3095238	82.73	Baik
6	X1.6	18	20	4	-	42	144	3.4285714	85.71	Baik
RATA-RATA									83.73	Baik
Indicator sumber daya yang memadai										
7	X1.7	12	21	9	-	42	129	3.0714286	76.78	cukupbaik
8	X1.8	22	16	4	-	42	144	3.4285714	85.71	baik
9	X1.9	18	21	3	-	42	141	3.3571429	83.92	baik
RATA-RATA									82.14	baik

Sumber: data primer diolah,2022

Berdasarkan dari tabel diatas, maka dapat diperoleh gambaran jawabanresponden sebagai berikut: Dari 9 item pernyataan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh skor rata-rata tertinggi pada indikator pemahaman tentang akuntansi dengan TCR 93,84 % dalam katogori sangat baik. Sedangkan skor rata-rata terendah berada pada indikator sumber daya yang memadai dengan TCR 82,14 % dalam kategori baik.

Untuk melihat hasil kuesioner dari variabel staf desa,maka ditampilkan jawaban dari 42 responden terhadap 9 (sembilan) pertanyaan tentang partisipasi masyarakat atas 3 (tiga) indikator.Berikut presentase jawaban untuk masing-masing pertanyaan pada variabel partisipasi masyarakat.

Tabel 10. Deskripsi Partisipasi Masyarakat (X2)

NO	ITEM	SS	S	TS	STS	N	Jumlah Skor	Rata-rata	TCR %	Kriteria
Indicator mengikuti acara pertemuan atau rapat										
1	X2.1	21	16	5	-	42	142	3.38095	84.52	baik
2	X2.2	18	21	3	-	42	141	3.35714	83.92	baik
3	X2.3	21	16	5	-	42	142	3.38095	84.52	baik
RATA-RATA									84.32	baik
Indicator ikut aktif dan diskusi rapat perencanaan pembangunan										
4	X2.4	13	26	3	-	42	139	3.30952	82.73	baik

5	X2.5	13	20	9	-	42	139	3.30952	82.73	baik
6	X2.6	18	20	4	-	42	144	3.42857	85.71	Baik
RATA-RATA									83.73	Baik
Indicator Keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan										
7	X2.7	12	21	9	-	42	129	3.07143	76.78	cukup baik
8	X2.8	22	16	4	-	42	144	3.42857	85.71	Baik
9	X2.9	18	21	3	-	42	141	3.35714	83.92	Baik
RATA-RATA									82.14	Baik

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan dari tabel diatas, maka dapat diperoleh gambaran jawaban responden sebagai berikut: Dari 9 item pernyataan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh skor rata-rata tertinggi pada indikator mengikuti acara pertemuan atau rapat desa dengan TCR 84,32 % dalam katogori baik. Sedangkan skor rata-rata terendah berada pada indikator keaktifan masyarakat dalam bidang pembangunan dengan TCR 82,14 % dalam kategori baik.

Untuk melihat hasil kuesioner dari variabel staf desa, maka ditampilkan jawaban dari 42 responden terhadap 9 (sembilan) pertanyaan tentang komitmen organisasi pemerintahan desa atas 3 (tiga) indikator. Berikut presentase jawaban untuk masing-masing pertanyaan pada variabel komitmen organisasi pemerintahan desa.

Tabel 11. Deskripsi Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa (X3)

No	Item	SS	S	TS	STS	N	JumlahSkor	Rata-rata	TCR %	Kriteria
Indicator penerimaan atas tujuan organisasi										
1	X3.1	6	23	12	1	42	151	3.595238	89.88	Baik
2	X3.2	13	22	5	2	42	167	3.97619	99.40	Sangat baik
3	X3.3	15	15	11	1	42	146	3.47619	86.90	Baik
RATA-RATA									92.06	Sangat baik
Indicator keinginan untuk bekerja keras										
4	X3.4	9	24	7	2	42	124	2.952381	73.80	cukup baik
5	X3.5	16	13	12	1	42	128	3.047619	76.19	Cukup baik
6	X3.6	10	22	9	1	42	125	2.97619	74.40	Cukup baik
RATA-RATA									74.80	Cukup baik
Indicator keinginan untuk bertahan diorganisasi										
7	X3.7	12	24	15	1	42	151	3.595238	89.88	Baik
8	X3.8	7	26	6	3	42	121	2.880952	72.02	Cukup baik
9	X3.9	12	15	12	1	42	118	2.809524	70.23	Cukup baik
RATA-RATA									77.38	Cukup baik

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan dari tabel diatas, maka dapat diperoleh gambaran jawaban responden sebagai berikut: Dari 9 item pernyataan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh skor rata-rata tertinggi pada indikator penerimaan atas tujuan organisasi dengan TCR 92,06 % dalam katogori sangat baik. Sedangkan skor rata-rata terendah berada pada indikator keinginan untuk bekerja keras dengan TCR 74,80 % dalam kategori cukup baik.

Untuk melihat hasil kuesioner dari variabel staf desa, maka ditampilkan jawaban dari 42 responden terhadap 9 (sembilan) pertanyaan tentang ketaatan laporan keuangan atas 3 (tiga) indikator. Berikut presentase jawaban untuk masing-masing pertanyaan pada variabel ketaatan laporan keuangan.

Tabel 12. Deskripsi Ketaatan Laporan Keuangan (X4)

No	ITEM	SS	S	TS	STS	N	Jumlah Skor	Rata-rata	TCR %	Kriteria
Indicator tanggung jawab penerapan										
1	X4.1	6	22	13	1	42	130	3.0952381	77.38	Cukup baik
2	X4.2	13	22	5	2	42	135	3.2142857	80.35	Baik
3	X4.3	14	15	12	1	42	138	3.2857143	82.14	Baik
RATA-RATA									79.96	Cukup baik
Indicator integritas										
4	X4.4	10	21	7	2	42	119	2.8333333	70.83	Cukup baik
5	X4.5	14	12	15	1	42	123	2.9285714	73.21	Cukup baik
6	X4.6	8	22	11	1	42	121	2.8809524	72.02	Cukup baik
RATA-RATA									72.02	Cukup baik
Indicator objektifkehati-hatian										
7	X4.7	12	14	15	1	42	121	2.8809524	72.02	Cukup baik
8	X4.8	7	26	6	3	42	121	2.8809524	72.02	Cukup baik
9	X4.9	12	16	11	3	42	121	2.8809524	72.02	Cukup baik
RATA-RATA									72.02	Cukup baik

Sumber : data primer diolah,2022

Berdasarkan dari tabel diatas, maka dapat diperoleh gambaran jawaban responden sebagai berikut: Dari 9 item pernyataan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh skor rata-rata tertinggi pada indikator tanggung jawab penerapan dengan TCR 79,96 % dalam katogori cukup baik. Sedangkan skor rata-rata terendah berada pada integritas dan objektif kehati-hatian dengan TCR 72,02 dalam kategori cukup baik.

Sesuai dengan ruang lingkup penelitian dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini maka dilakukan analisis data deskriptif Kualitatif dengan alat analisis regresi linear berganda dengan penyelesaian menggunakan program SPSS 20.00 dengan menggunakan rumus regresi linear berganda seperti yang dikutip oleh Arifin (2017).

Tabel 13. Analisis regresi linear berganda Pengaruh Kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa, Partisipasi masyarakat, Komitmen organisasi pemerintahan desa, ketaatan laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan Siulak Mukai.

Coefficients ^a											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Zero-order	Partial	Part	Tolerance
1	(Constant)	-1.436	3.178		-.452	.654					
	Kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa	-.016	.086	-.007	-.192	.849	-.171	-.032	-.007	.947	1.056
	Partisipasi masyarakat	1.075	.039	.978	27.329	.000	.977	.976	.953	.950	1.052
	Komitmen organisasi pemerintahan	-.094	.143	-.112	-.655	.516	-.068	-.107	-.023	.042	24.080
	Ketaatan laporan keuangan	.085	.144	.101	.591	.558	-.090	.097	.021	.042	24.037

a. Dependent Variable: pengelolaan keuangan desa

Sumber: Data primen diolah,2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut $Y = -1.436 + -0.016 + 1.075 + -.094 + 0,085$ Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel Partisipasi masyarakat dan ketaatan laporan keuangan bertanda positif sedangkan koefisien regresi variabel kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa dan komitmen organisasi pemerintahan bertanda negatif. Koefisien regresi yang bertanda positif berarti berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa sedangkan koefisien regresi yang bertanda negatif berarti tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Persamaan tersebut memiliki makna :

1. Konstanta $= -1,436$ Jika variabel kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa (X_1), partisipasi masyarakat (X_2), komitmen organisasi pemerintahan desa (X_3), dan ketaatan laporan keuangan (X_4) = 0 Maka kepuasan pengelolaan keuangan desa (Y) sebesar $-1,436$.
2. Koefisien regresi kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa (X_1) $= -0,016$ Jika variabel kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa naik sebesar 1 (satu) artinya semakin menurunnya pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai sebesar $-0,016$.
3. Koefisien regresi partisipasi masyarakat (X_2) $= 1,075$ Jika variabel partisipasi masyarakat turun sebesar 1 (satu) artinya semakin bertambah pengelolaan keuangan desa sebesar $1,075$.
4. Koefisien regresi komitmen organisasi pemerintahan desa (X_3) $= -0,094$ Jika variabel komitmen organisasi pemerintahan desa naik sebesar 1 (satu) artinya semakin menurunnya pengelolaan keuangan desa sebesar $-0,094$.
5. Koefisien regresi ketaatan laporan keuangan (X_4) $= 0,085$ Jika variabel ketaatan laporan keuangan turun sebesar 1 (satu) artinya semakin bertambah pengelolaan keuangan desa sebesar $0,085$.

Tabel 14. Koefisien Determinasi Secara Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.436	3.178		-.452	.654					
kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa	-.016	.086	-.007	-.192	.849	-.171	-.032	-.007	.947	1.056
partisipasi masyarakat	1.075	.039	.978	27.329	.000	.977	.976	.953	.950	1.052
komitmen organisasi pemerintahan	-.094	.143	-.112	-.655	.516	-.068	-.107	-.023	.042	24.080
ketaatan laporan keuangan	.085	.144	.101	.591	.558	-.090	.097	.021	.042	24.037

Dependent Variable: pengelolaan keuangan desa

Sumber: Data primer diolah, 2022.

Koefisien determinasi parsial digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh salah satu variabel independen (x) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.

1. Besar pengaruh kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa (X_1) terhadap Pengelolaan keuangan desa (Y).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan tabel 22 dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 K_d &= \text{Beta} \times \text{zero order} \times 100\% \\
 &= -0,007 \times -0,171 \times 100\% \\
 &= 0,11\%
 \end{aligned}$$

Hal ini berarti besar pengaruh kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa terhadap

pengelolaan keuangan desa secara parsial adalah 0,11 %

2. Besar pengaruh partisipasi masyarakat (X2) terhadap Pengelolaan keuangan desa (Y).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan tabel 4.18 dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Kd &= \text{beta} \times \text{zero order} \\ &= -0,978 \times 0,977 \times 100\% \\ &= 95,55\% \end{aligned}$$

Hal ini berarti besar pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa secara parsial adalah 95,55 %

3. Besar pengaruh komitmen organisasi pemerintahan (X3) terhadap Pengelolaan keuangan desa (Y).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komitmen organisasi pemerintahan terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan tabel 22 dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Kd &= \text{Beta} \times \text{zero order} \times 100\% \\ &= -0,112 \times -0,068 \times 100\% \\ &= 0,76\% \end{aligned}$$

Hal ini berarti besar pengaruh komitmen organisasi pemerintahan desa terhadap pengelolaan keuangan desa secara parsial adalah 0,76 %

4. Besar pengaruh ketaatan laporan keuangan (X4) terhadap Pengelolaan keuangan desa (Y).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ketaatan laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan tabel 22 dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Kd &= \text{Beta} \times \text{zero order} \times 100\% \\ &= 0,101 \times 0,090 \times 100\% \\ &= 0,90\% \end{aligned}$$

Hal ini berarti besar pengaruh ketaatan laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan desa secara parsial adalah 0,90 %

Untuk mengetahui besar pengaruh kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa (X1), partisipasi masyarakat (X2), komitmen organisasi pemerintahan desa (X3), ketaatan laporan keuangan (X4) secara simultan Terhadap Pengelolaan keuangan desa (Y) pada kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci.

Tabel 15. Besar pengaruh kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa (X1), partisipasi masyarakat (X2), komitmen organisasi pemerintahan desa (X3), ketaatan laporan keuangan (X4) secara simultan Terhadap Pengelolaan keuangan desa (Y). Pada Kecamatan siulak mukai Kabupaten Kerinci.
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
									nge	
1	.688 ^a	.474	.417	.532	.474	8.321	4	37	.000	2.146

Predictors: (Constant), Komitmen dalam pemerintahan desa, Partisipasi masyarakat, Kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa
Dependent Variable: y1

Sumber: data primer diolah, 2021

Dari tabel 15 diatas diketahui bahwa koefisien determinasi yang telah disesuaikan (*R Square*) adalah sebesar 0,474 atau 22,46%. Semakin besar angka *R-Square* maka akan semakin kuat hubungan dari kelima variabel dalam model regresi. Atau dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} KD &= r^2 \times 100\% \\ &= 0,474 \times 100\% \\ &= 22,46\% \end{aligned}$$

Koefisien Determinasi yang berarti 22,46 % pengaruh variabel kompetensi aparat pengelolaan

keuangan desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintahan desa, ketaatan laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan sisanya (100% - 22,46%) yaitu 77,54 % dijelaskan oleh faktor penyebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Untuk menguji signifikan pengaruh kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintahan desa dan ketaatan laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan siulak mukai. secara parsial menggunakan uji t. Dengan tingkat signifikansi untuk uji 2 arah 5 % (0,05), dan jumlah responden 42 orang, maka didapat t tabel adalah $df = n - k$ sehingga $df = 42 - 5 = 37$ di peroleh $t_{tabel} = 2,02619$ Sedangkan untuk t_{tabel} dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 16. Koefisien determinasi secara parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
	(Constant)	-1.436	3.178		-.452	.654					
	kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa	-.016	.086	-.007	-.192	.849	-.171	-.032	-.007	.947	1.056
1	partisipasi masyarakat	1.075	.039	.978	27.329	.000	.977	.976	.953	.950	1.052
	komitmen organisasi pemerintahan	-.094	.143	-.112	-.655	.516	-.068	-.107	-.023	.042	24.080
	ketaatan laporan keuangan	.085	.144	.101	.591	.558	-.090	.097	.021	.042	24.037

a. Dependent Variable: pengelolaan keuangan desa

Sumber: Data primen diolah, 2021.

1. Pengaruh kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa (X1) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y). Kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa berpengaruh negative terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai, ini dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-0,192 > -2,02619$) serta dengan nilai signifikansi = $0,849 > 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai kabupaten kerinci.
2. Pengaruh Partisipasi masyarakat (X2) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y). Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai, ini dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($27,329 > 2,02619$) serta dengan nilai signifikansi = $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang positif signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai kabupaten kerinci.
3. Pengaruh komitmen organisasi pemerintahan desa (X3) terhadap pengelolaan keuangan desa. Komitmen organisasi pemerintahan desa berpengaruh negative terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai, ini dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-0,655 > -2,02618$) serta dengan nilai signifikansi = $0,516 > 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang negative signifikan antara komitmen organisasi pemerintahan desa terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai kabupaten kerinci.
4. Pengaruh ketaatan laporan keuangan (X4) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y). Ketaatan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai, ini dibuktikan dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,591 < 2,02619$) serta dengan nilai signifikansi =

0,558 > 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara ketaatan laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai kabupaten kerinci.

Pengujian Secara Simultan (Uji f)

Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa (X1), partisipasi masyarakat (X2), komitmen organisasi pemerintahan desa (X3), ketaatan laporan keuangan (X4) secara simultan Terhadap Pengelolaan keuangan desa (Y). Dengan tingkat signifikansi 5% (0,05) dan jumlah responden 42 orang, maka di dapat F tabel adalah $df_1 = k-1$ ($5-1=4$) $df_2 = n-k$ ($42-4=38$) diperoleh $F = 2,62$ Adapun hasil hipotesis secara simultan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 24

Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Keuangan Desa (X1), Partisipasi Masyarakat (X2), Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa (X3), Ketaatan Laporan Keuangan (X4) Secara Parsial Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y). Pada Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci.
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	532.540	4	133.135	196.236	.000 ^b
	Residual	25.102	37	.678		
	Total	557.643	41			

a. Dependent Variable: pengelolaan keuangan desa

b. Predictors: (Constant), ketaatan laporan keuangan, partisipasi masyarakat, kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa, komitmen organisasi pemerintahan

Sumber: Data primen diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dari uji ANOVA atau F-tes ternyata didapat F hitung 196,236 dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($196,236 > 2,62$) serta dengan nilai signifikan = $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa (X1), partisipasi masyarakat (X2), komitmen organisasi pemerintahan (X3) Dan ketaatan laporan keuangan desa (X4) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai kabupaten kerinci.

Diskusi

Pengaruh kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa (X1) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y)

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa berpengaruh negative terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai, Besarnya pengaruh Kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai sebesar -0,192 ini dibuktikan dengan t hitung > t tabel ($-0,192 > -2,02619$) serta dengan nilai signifikansi = $0,849 > 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar -0,192 dan kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa memiliki pengaruh negative terhadap pengelolaan keuangan desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa merupakan variabel penting dalam pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai kabupaten kerinci.

Pengaruh partisipasi masyarakat (X2) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y)

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai, Besarnya pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai sebesar 27,329 ini dibuktikan dengan t hitung > t tabel ($27,329 > 0,02619$) serta dengan nilai signifikansi = $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar 27,329 dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan desa, sehingga bisa dikatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan variabel yang penting dalam pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai kabupaten

kerinci.

Pengaruh komitmen organisasi pemerintahan desa (X3) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y)

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintahan desa berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai, Besarnya pengaruh komitmen organisasi pemerintahan desa terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai sebesar -0,655 ini dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (-0,655 > -2,02618) serta dengan nilai signifikansi = 0,516 > 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya komitmen organisasi pemerintahan desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar -0,655 dan komitmen organisasi pemerintahan desa memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa komitmen organisasi pemerintahan merupakan variabel penting dalam pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai kabupaten kerinci.

Pengaruh ketaatan laporan keuangan (X4) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y)

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa ketaatan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai, Besarnya pengaruh ketaatan laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai sebesar 0,591 ini dibuktikan dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,591 < 2,02619) serta dengan nilai signifikansi = 0,558 > 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ketaatan laporan keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar 0,591 dan ketaatan laporan keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan desa, sehingga bisa dikatakan bahwa ketaatan laporan merupakan variabel yang penting dalam pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai kabupaten kerinci.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa berpengaruh negative terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai, ini dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (-0,192 > -2,02619) serta dengan nilai signifikansi = 0,849 > 0,05 serta besarnya pengaruh kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai kabupaten kerinci adalah 0,11 %.
2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai, ini dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (27,329 > 0,02619) serta dengan nilai signifikansi = 0,000 < 0,05 serta besarnya pengaruh partisipasi masyarakat secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai kabupaten kerinci adalah 95 %
3. Komitmen organisasi pemerintahan desa berpengaruh negative terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai, ini dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (-0,655 > -2,02618) serta dengan nilai signifikansi = 0,516 > 0,05 serta besarnya pengaruh komitmen organisasi pemerintahan desa secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai kabupaten kerinci adalah 0,7 %.
4. Ketaatan laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai, ini dibuktikan dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,591 < 2,02619) serta dengan nilai signifikansi = 0,558 > 0,05 serta besarnya pengaruh ketaatan laporan keuangan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai kabupaten kerinci adalah 0,90 %.
5. Kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa, dan komitmen organisasi pemerintahan desa berpengaruh negative signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat dan Ketaatan laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak mukai. didapat F_{hitung} 196,236 dimana $f_{hitung} > f_{tabel}$ (196,236 > 2,62) serta dengan nilai signifikan = 0,000 < 0,05 dan besarnya pengaruh kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa (X1), partisipasi masyarakat (X2), komitmen organisasi pemerintahan (X3) Dan ketaatan laporan keuangan desa (X4) pengelolaan keuangan desa dikecamatan siulak

mukai kabupaten kerinci secara simultan adalah sebesar 22,46%

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan diambil dari hasil penelitian maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Agar pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan baik dari hasil perhitungan rata-rata skor paling rendah dengan TCR 76,58 % dalam kategori cukup baik. Hendaknya pemerintah perlu meningkatkan pengelolaan keuangan desa khususnya pada indikator bidang penyelenggara pemerintah desa.
2. Agar kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan baik dari hasil perhitungan rata-rata skor paling rendah dengan TCR 82,14 % dalam kategori baik. Hendaknya pemerintah perlu meningkatkan kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa khususnya pada indikator sumber daya yang memadai.
3. Agar partisipasi masyarakat dilakukan dengan baik dari hasil perhitungan rata-rata skor paling rendah dengan TCR 78,14 % dalam kategori baik. Hendaknya pemerintah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pada indikator keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Agar komitmen organisasi pemerintahan desa dilakukan dengan baik dari hasil perhitungan rata-rata skor paling rendah dengan TCR 74,80 % dalam kategori cukup baik. Hendaknya pemerintah perlu meningkatkan komitmen organisasi pemerintahan desa khususnya pada indikator keinginan untuk bekerja keras.
5. Agar ketaatan laporan keuangan dilakukan dengan baik dari hasil perhitungan rata-rata skor paling rendah dengan TCR 72,02 % dalam kategori cukup baik. Hendaknya pemerintah perlu meningkatkan ketaatan laporan keuangan khususnya pada indikator objektif dan kehati-hatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Armainsi, R. (2017). Asas-asas pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian akuntabilitas penggunaan dana desa. *Jurnal acsy politeknik sekayu*, 57-67.
- Ahmad, Fauzi. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tesis. Universitas Muhamadiyah. Magelang.
- Ahazrina. (2017). Jenis-jenis akuntansi dan pengertiannya. [online] <http://dosenakuntansi.com/jenis-jenis-akuntansi>. (diakses juli 2021).
- Baviga, R. (2022). Pengaruh Independensi dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi empiris pada kantor Inspektorat Kota Sungai Penuh). *Indonesian Journal of Business and Management*, 2(1), 22.
- Frink, D. D. dan Klimoski, R.J. (2004). *Advancing accountability theory and practice: introduction to the human resource management review special edition*. *Human Resource management review* 14 (2004)1-17.
- Haryanto. (2007). Prinsip-prinsip *Good Governance* Desa. Edisi pertama.
- Naimah. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa. *tesis*. Medan: universitas sumatera utara.
- Nandy. (2017). Akuntansi sektor publik pengertian menurut ahli tujuan, jenis. [online]. <http://www.gramedia.com/literasi/akuntansi-sektor-publik/>. (diakses juli 2021).
- Noto Admodjo, Soekidjo. (2003). Pengembangan sumber daya manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamdani. (2018). Pengelolaan+keuangan+desa+menurut+grand+teori. [online]. diakses dari <http://digilib.uinsgd.ac.id> > 4. Diakses (juni 2021).
- Puji Agus., Widyaishwara Madya. (2015). Pengelolaan keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Keuangan Desa. [online]. diakses dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-cimahi-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pelaksanaan-keuangan-desa-2019-11-05-c27eb8fe/>. (juli 2021).
- Randini. (2018). *Pemerintah desa*. [online]. <http://eprints.polsri.ac.id> (diakses juli 2021)
- Raka Fahreza Widyananda. (2020). Tujuan akuntansi serta manfaat dan fungsinya. [online]. <https://m.merdeka.com/jatim/tujuan-akuntansi-seerta-manfaat-dan-fungsinya>

- [.menambah-wawasan-kln.html?page=all](#).(diakses juni)
Repository UIN Suska.Pengelolaan.[online].<http://repository.uin-suska.ac.id>.(diaksesjuli 2021).
Robbins Stephen P. Dan Judge Timothy A. (2015). *Perilaku Organisasi*. Edisi 16, Jakarta: Salemba empat.
Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan, edisi ketiga cetakan kedelapan*.Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
UU Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Warren dkk. (2014). Pengertian akuntansi menurut para ahli. Dosen pendidikan.[Online]. <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-akuntansi-menurut-para-ahli>. (diakses juli 2021).